

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat, sebagaimana kedaulatan tersebut dijalankan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”<sup>1</sup> artinya adalah Kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat dan rakyat yang memiliki sebuah kekuasaan yang diserahkan kepada negara untuk menjalankan fungsinya. Kedaulatan rakyat merupakan ajaran dari demokrasi. Sehingga rakyatlah yang sepenuhnya memegang kekuasaan negara.

Negara Indonesia juga memiliki karakteristik yaitu sebagai Negara hukum yang telah diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”<sup>2</sup> Sebagai Negara Hukum dalam menjalankan roda pemerintahan harus berdasarkan kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Indonesia sebagai Negara hukum telah mengatur hak warga Negara sampai dengan kewajiban warga Negaranya dan harus menghormati serta menjunjung tinggi segala hak dan kewajiban warga Negara.

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

<sup>2</sup> Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Atas dasar Negara Indonesia menggunakan konsep Negara Hukum “*rechtsstaat*” menurut Friedrich Julius Stahl terdapat lima ciri Negara Hukum, satu diantaranya adalah Undang-undang Dasar yang harus menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia,<sup>3</sup> oleh karena tanpa adanya jaminan tersebut, maka Hukum akan menjadi sarana penindasan. Penegasan ini menyatakan bahwa demokrasi sebagai paradigma dan tidak berdiri sendiri.

Akan tetapi paradigma demokrasi yang dibangun harus di dasarkan pada nilai hukum itu sendiri, sehingga produk demokrasi dapat di kontrol normatif oleh paradigma hukum. Paradigma ini berimplikasi pada model kekuasaan Negara, kelembagaan Negara, prinsip pemisahan kekuasaan serta (*checks and balances*).<sup>4</sup> Kemudian kontrol normatif yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga peradilan.

Berangkat dari sistem demokrasi yang digunakan Negara Indonesia, salah satu permasalahan yang timbul karena adanya perdebatan mengenai boleh tidaknya mantan narapidana untuk berkompetisi sebagai calon anggota legislatif dalam pesta demokrasi Pemilihan Umum tahun 2019 mendatang. Hal ini menimbulkan tarik menarik prinsip antara menjaga sebuah “Kehormatan” pejabat dengan pemberian kesempatan “bertobat”.

---

<sup>3</sup> Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta: 1999, Hal. 24

<sup>4</sup> Mukthie Fadjar, A, *Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigmatik*, In-Trans, Malang: 2003, Hal. 8-9

Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan sebuah peraturan pemilu legislatif 2019 yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Peraturan tersebut melarang orang yang telah dihukum karena korupsi, perdagangan narkoba, dan kekerasan seksual pada anak.

Hal ini mengundang berbagai macam opini publik terkait dengan boleh tidaknya mantan narapidana Korupsi berkompetisi sebagai calon anggota legislatif. Dan hal tersebut menjadi polemik sebagaimana diatur secara spesifik di dalam Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi *“Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi”*.<sup>5</sup> Kemudian Pasal 11 ayat (1) huruf d *“Pakta integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir model B.3”*.<sup>6</sup> Dan lampiran model B.3 terkait *Pakta Integritas*, didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018.

Setelah Mahkamah Agung melakukan uji materi terhadap Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi *“Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana*

---

<sup>5</sup> Lihat Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

<sup>6</sup> Lihat Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

*Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi*”. Pasal 11 ayat (1) huruf d “*Pakta integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir model B.3*”, dan lampiran model B.3 terkait *Pakta integritas* didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Dengan dibatalkannya pasal tersebut sebab bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menurut Hans Kelsen dalam teori Stufenbau (*Stufenbau Des Rechts Theorie*) norma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi norma dasar tersebut ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar (*Grundnorm*). Namun norma tersebut ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma yang berada dibawahnya.<sup>7</sup>

Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang melaksanakan Undang-undang yang telah mengeluarkan sebuah peraturan yang berlaku secara internal. Dengan adanya peraturan tersebut maka hal ini membuat norma baru yang seharusnya norma ini harus ada didalam muatan dalam sebuah Undang-undang, sehingga Mahkamah Agung mendapatkan bahwa hal ini bertentangan atau tidak sesuai.

---

<sup>7</sup> Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State* (Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara) Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung: 2010, Hal. 179

Dikuatkan oleh pendapat Hans Nawiasky dengan teori Nawiasky (*Theory von stufenufbau der rechtsordnung*) bahwa (*Staats fundamental*) norm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar atau (*staatsverfassung*) dari suatu Negara.<sup>8</sup> Sejalan dengan teori Nawiasky dalam penerapannya pada struktur atau hierarki tata perundang-undangan di Indonesia yaitu:<sup>9</sup> a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d) Peraturan Pemerintah; e) Peraturan Presiden; f) Peraturan Daerah Provinsi; dan g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dilihat secara formil didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan peraturan perundang-undangan dalam hal ini peraturan komisi diakui keberadaannya dan mempunyai hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.<sup>10</sup>

Dengan demikian pembatalan Pasal 4 ayat (3) “*Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi*”, Pasal 11 ayat (1) huruf d “*Pakta integritas yang*

---

<sup>8</sup> Ibid, Hal. 181

<sup>9</sup> Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>10</sup> Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

*ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir model B.3”, dan lampiran model B.3 terkait Pakta Integritas tidak sejalan, berbenturan, atau tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.*

Akan tetapi menurut penulis hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia lebih berpihak kepada aturan yang bersifat prosedural. Dengan dibatalkannya pasal tersebut oleh Mahkamah Agung, hal tersebut tidak sepenuhnya salah sebab bertentangan dengan Undang-undang yang lebih tinggi yaitu Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tetapi sangat jelas kita menjauhkan diri dari hukum yang progresif.

Putusan Mahkamah Agung sendiri telah membenturkan asas kepastian hukum dengan asas kemanfaatan dan keadilan, hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung yang membatalkan pasal tersebut lebih berpihak kepada prosedur belaka dan tidak menimbang dari segi kemanfaatan dan keadilan dalam sendi kehidupan bermasyarakat.

Sejalan dengan cita dan tujuan hukum Negara Indonesia dalam hal mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penulis menilai Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang diberi kewenangan dan amanah oleh Undang-Undang Dasar memiliki kewajiban dan tanggung jawab serta semangat yang bulat untuk mewujudkan penyelenggara Negara yang kuat dan warga Negara yang berdaulat.

Hal tersebut tidak lain demi terwujudnya Negara bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Karena praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sangat berpeluang besar dan merusak sendi-sendi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta sangat membahayakan eksistensi Negara sejak dulu hingga sekarang.

Berangkat dari hal tersebut semangat dan tujuan Komisi Pemilihan Umum dalam mewujudkan warga Negara yang berdaulat salah satunya dengan dilaksanakan suatu pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat akan pemimpin Negara sebagai perwakilan rakyat yang bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menjamin kualitas kehidupan masyarakat yang baik pada masa yang akan datang.

Bersumber dari masalah bangsa dan Negara yang terus menjangkiti kehidupan masyarakat tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme, hal ini terbukti dari berbagai catatan buruk atas praktik penyelenggara Negara khususnya di tubuh lembaga perwakilan rakyat di Indonesia (DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota).

Catatan-catatan buruk tersebut berdasarkan catatan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang pada awal dibentuknya hingga sekarang yang dapat di nilai bahwa dari tahun ke tahun semakin banyaknya penindakan terhadap Penyelenggara Negara di Lembaga Perwakilan Rakyat yang dapat merusak sendi-sendi penyelenggara negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional dan pada kenyataannya telah terjadi dalam praktik-praktik usaha yang lebih

menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Hal ini dapat di lihat dalam data statistik Komisi Pemilihan Umum tentang penindakan Korupsi berdasarkan Jabatan atau Profesi.

**Tabel I**  
**Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan<sup>11</sup>**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penindakan Terhadap Jabatan Anggota DPR dan DPRD</b>
2004	0
2005	0
2006	0
2007	2
2008	7
2009	8
2010	27
2011	5
2012	16
2013	8
2014	9
2015	19
2016	23
2017	20
2018	61
<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>205</b>

Dengan demikian telah nyata bahwa praktik Korupsi, kolusi dan nepotisme telah berakar kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dikalangan pejabat dan penyelenggara Negara dan terbukti bahwa adanya keterlibatan anggota dewan perwakilan rakyat. Hal ini menjadi landasan Komisi

<sup>11</sup> KPK. *Statistik Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan*. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>. Akses 2 November 2018



Pemilihan umum dalam formulasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018.

Aturan hukum telah ditetapkan sebagai salah satu fitur utama dari apa yang telah dikonseptualisasikan sebagai pemerintahan yang baik, kemudian kebijaksanaan sangat diperlukan dan di sinilah pentingnya etika dan norma profesional memiliki peran besar untuk dimainkan. Tentunya urgensi tersebut, juga akan mendorong dan membantu dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Tujuan dari adanya penegakan etika yakni untuk melindungi masyarakat dari perilaku korup para pemangku kekuasaan. Chapman mengatakan, hal tersebut dikarenakan etika mengacu pada seseorang agar berperilaku secara baik dan benar dalam penerapannya.

Urgensi dan tujuan etika tersebut, tentunya dalam rangka sebagai pedoman dan rambu-rambu dalam mendapatkan kekuasaan serta menjalankan kekuasaan. Sebab dalam proses mendapatkan kekuasaan, haruslah dilalui dengan jalur-jalur, perilaku dan cara yang suci. Hal tersebut, amat dibutuhkan sebagai cerminan demokrasi yang berintegritas. Dengan jalur, perilaku dan cara yang suci, tentunya calon terpilih akan mendapatkan legitimasi dan dukungan penuh dari masyarakat.

Jangan sampai moralitas publik sudah diciderai sejak proses pemilihan berlangsung, karena masyarakat dipertontonkan dengan banyaknya calon yang telah menjadi tersangka/terdakwa/terpidana ketika akan mencalonkan menjadi Calon Legislatif.

Atas dasar latar belakang tersebut dengan permasalahan yang telah di terangkan di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mengangkat masalah ini sebagai skripsi dengan judul **“Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/Hum/2018 tentang Uji Materiil Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”**

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk memberikan kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang akan di teliti. Sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas dalam latar belakang masalah, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar Pertimbangan Hakim atas putusan Mahkamah Agung No. 46 P/Hum/2018?
2. Bagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/Hum/2018 ditinjau dari perspektif HAM?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam putusan Mahkamah Agung No. 46 P/Hum/2018.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji putusan Mahkamah Agung No.

46 P/Hum/2018 ditinjau dari perspektif Hak asasi manusia.

#### **D. Manfaat Penulisan**

Adapun Manfaat dari penelitian hukum ini dapat dibagi sebagai berikut:

##### **1. Bagi Penulis**

Secara objektif, penelitian ini memberikan dan meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang perspektif hak asasi manusia terhadap larangan mantan narapidana korupsi maju dalam kontestasi politik pada pemilihan umum. Selain itu juga secara subjektif penelitian ini adalah merupakan syarat Penulisan Tugas Akhir dalam menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan gelar Sarjana Hukum.

##### **2. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan dalam pembuatan aturan terkait teknis penyelenggaraan Pemilu yang lebih mengedepankan rasa keadilan masyarakat dengan tetap dalam kerangka konstitusi. Sehingga pemilu dapat menjadi sarana bagi masyarakat dalam memilih dan menentukan pemimpin – pemimpin bangsa yang bersih dan berintegritas.

##### **3. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat luas agar lebih memahami hakikat demokrasi dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Sementara itu adapun kegunaan yang diharapkan penulis yaitu, tulisan ini dapat menjadi referensi dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara terkait pemilihan umum. Selain itu, diharapkan juga hasil penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi maupun teoritis hukum serta bagi masyarakat pada umumnya.

## **F. Metode Penulisan**

### **1. Metode Pendekatan**

Adapun metode pendekatan dalam Penelitian ini pertama model pendekatan yang terdiri atas pendekatan undang-undang (*statute approach*), kedua pendekatan konseptual (*conceptual approach*), ketiga pendekatan sosiologis (*sociological approach*) dan ke empat pendekatan filosofis (*philosophical approach*).<sup>12</sup>

Pertama, menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan ini digunakan karena akan menganalisis dan meneliti peraturan Perundang-undangan terkait, kedua pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan ini digunakan karena penelitian ini akan melahirkan sebuah gagasan baru bagi proses pemilu terutama terkait dengan mantan narapidana korupsi, ketiga pendekatan sosiologis (*sociological approach*) pendekatan ini digunakan karena akan meneliti hubungan hukum dengan moral dan logika hukum internal itu sendiri dalam pranata sosial dan kondisi – kondisi sosial yang menimbulkan hukum. Keempat pendekatan filosofis (*philosophical approach*) pendekatan ini

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta: 2005, Hal. 35

digunakan karena penelitian ini akan menganalisis hakikat dari Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam perspektif keadilan universal.

## **2. Jenis bahan hukum**

- a. Bahan hukum primer yaitu UUD NRI 1945, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tentang Uji Materi PKPU Nomor 20 Tahun 2018, UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
- b. Sumber bahan sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengetahuan baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (*idea*). Bahan sekunder ini mencakup.<sup>13</sup> Buku/tekstual, artikel ilmiah dari internet, jurnal-jurnal, doktrin, atau sumber-sumber lain baik cetak maupun online yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
- c. Bahan Hukum Tersier yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum dan lain-lain.

## **3. Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan (*library research*). Yakni pengkajian informasi tertulis terkait

---

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, Hal. 51.

hukum yang berasal dari berbagai macam sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum, yaitu penulisan yang berdasarkan pada data-data yang bisa digunakan sebagai obyek penulisan untuk kemudian dilakukan pengkajian dan disusun secara komprehensif.

#### **4. Analisa Bahan Hukum**

Analisa data pada penelitian ini, dilakukan secara deskriptif kualitatif yakni dengan cara memilih teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang terkait. Data-data yang di analisa secara kualitatif selanjutnya akan disampaikan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antar model data. Selanjutnya seluruh data akan diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif dengan demikian selain memberikan gambaran dan mengungkapkan dasar hukumnya diharapkan juga dapat menjadi solusi dari permasalahan yang ada.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Pada penulisan ini, penulis akan menyajikan empat bab yang terdiri dari sub-sub bab, sistematika penulisan ini secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat berbagai hal yang menjadi latar belakang pemilihan topik dari penulisan skripsi dan sekaligus menjadi pengantar umum untuk memahami penulisan secara keseluruhan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan

penulisan, manfaat penulisan, kegunaan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab II ini penulis akan menyampaikan dan menjelaskan landasan teori dan atau kajian teori yang mendukung hasil penelitian dalam membahas permasalahan yang didapat oleh penulis, yaitu berkenaan dengan tinjauan umum tentang kekuasaan kehakiman, tinjauan umum tentang pengujian perundang - undangan, tinjauan umum tentang komisi pemilihan umum dan tinjauan umum tentang hak asasi manusia.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan secara rinci mengenai jawaban terhadap permasalahan yang berhubungan dengan objek yang diteliti yakni: Dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam putusan Mahkamah Agung No. 46 P/Hum/2018 dan bagaimana putusan Mahkamah Agung No. 46 P/Hum/2018 ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir atau penutup yang didalamnya berisi kesimpulan – kesimpulan dari hasil penelitian hukum.